

MENGUAK HAMBATAN GRADUASI: DINAMIKA PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) PADA KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)

Journal History: Received 17 January 2024 | Accepted to publish 28 June 2024
DOI: <https://doi.org/10.31595/lindayasos.v6i1.1132>

Muhammad Irfan Hartadi¹

Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial,
Universitas Jember.
hartadiirfan060500@gmail.com

Arif², Sari Dewi Poerwanti³

Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial,
Universitas Jember.
ariefeducation@gmail.com
saridewi.fisip@unej.ac.id

ABSTRAK

Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, transformasi perilaku peserta KPM PKH yang tidak mendukung upaya peningkatan kesejahteraan, serta memutus mata rantai kemiskinan lintas generasi. Graduasi sebagai fase keempat dari PKH, yang merujuk pada proses pengakhiran status keanggotaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam partisipasi program. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat penghambat untuk mencapai graduasi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis, mengkaji, serta mendeskripsikan mengenai deselerasi graduasi PKH Pada KPM di Desa Glundengan, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data menggunakan metode observasi non-partisipan, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Metode dalam menganalisis data menggunakan cara pengumpulan data, reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Metode uji keabsahan data menggunakan triangulasi teknik dan sumber. Hasil penelitian ini menemukan faktor penghambat terwujudnya tujuan graduasi mandiri di desa Glundengan, yaitu dari faktor SDM keluarga penerima PKH yang berkaitan dengan penyalahgunaan alokasi bantuan, *mindset*, keberagaman suku, kemudian faktor lainnya yaitu jumlah nominal bantuan yang diterima dan mekanisme pendampingan PKH.

Kata kunci: Graduasi, Program Keluarga Harapan, Keluarga Penerima Manfaat

ABSTRACT

The Program Keluarga Harapan (PKH) is expected to enhance human resources quality, transform the behavior of participants of the Recipient Family Welfare (KPM) PKH who do not support efforts to improve welfare, and break the intergenerational poverty cycle. Graduation, as the fourth phase of PKH, refers to the process of ending membership status of KPM families in the program. However, there are barriers hindering graduation achievement. This study aims to analyze, examine, and describe the deceleration of PKH graduation among KPM in Glundengan Village, Wuluhan District, Jember Regency. The research employs a qualitative descriptive approach. Data collection utilizes non-participant observation, semi-structured interviews, and documentation. The data analysis method involves data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing. Triangulation of techniques and sources is used to validate the data. The research findings identify inhibiting factors for achieving self-graduation goals in Glundengan Village, including family human resource factors related to misuse of aid allocation, *mindset*, ethnic diversity, as well as other factors such as the amount of aid received and the PKH mentoring mechanism.

KEYWORDS:

Graduation, Program Keluarga Harapan, Beneficiary Family

PENDAHULUAN

Rendahnya populasi usia produktif di suatu wilayah berdampak signifikan terhadap *mindset* individu (Andi Selama ini, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengentaskan kemiskinan (Asep & Riyan, 2020; Ahmad, 2020; Purwanto et al., 2020). Meskipun berbagai program sosial telah diimplementasikan, namun hasilnya belum sepenuhnya maksimal. Data menunjukkan bahwa, tingkat kemiskinan di Indonesia masih tetap tinggi, dengan tercatat sebesar 9,36% dari total populasi, yang setara dengan 25,9 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan (BPS 2023). Atas dasar itu, sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan berupa Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2007 di tujuh provinsi, hingga meluas pada tahun 2020 dengan jumlah 34 provinsi dan mencakup 514 kabupaten dan kota serta 6.709 kecamatan (Panduan PKH, 2020). PKH telah berkontribusi dalam menekan angka kemiskinan dan mendorong kemandirian penerima bansos. Penerima bantuan dalam PKH dinamakan Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disebut KPM. Bantuan tersebut diberikan pada keluarga miskin dan rentan miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, kemudian data tersebut di klasifikasikan berdasarkan kriteria tertentu dan dikirim melalui PUSDATIN (Pusat Data Dan Informasi) yang kemudian disesuaikan dengan kriteria untuk penerima PKH sendiri, walaupun hingga saat ini masih terdapat isu akurasi data dan distribusi. Program ini memberikan bantuan tunai bersyarat kepada keluarga miskin untuk meningkatkan akses mereka ke layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial (Ayu & Santoso, 2019). Hal ini telah menjangkau lebih dari 10 juta keluarga di seluruh Indonesia, banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang masih kesulitan untuk mencapai graduasi atau kemandirian ekonomi.

Studi terdahulu, telah menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia (Asep Suryahadi & Riyan Al Izzati, 2020). Meskipun, ada tantangan terkait banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mengalami kesulitan untuk mencapai graduasi karena berbagai tantangan sosial dan ekonomi yang mereka hadapi (Kementerian Sosial RI, 2021). Dalam hal ini, tantangan yang kompleks, seperti ketidakstabilan pekerjaan, rendahnya tingkat pendidikan, dan keterbatasan akses ke layanan kesehatan. Studi menunjukkan bahwa, 43% dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) masih menghadapi kesulitan ekonomi yang signifikan, bahkan setelah beberapa tahun mendapatkan bantuan dari PKH (Rahmansyah et al, 2020; Gultom et al, 2021; Armalid et al., 2020).

KPM PKH yang sudah menjadi peserta selama 5 (lima) tahun akan melalui proses resertifikasi, maka dari itu, dalam pelaksanaan PKH di Desa Glundengan, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember tidak terlepas dari permasalahan terkait pelaksanaan graduasi. Permasalahan dalam pelaksanaan PKH adalah dari proses mengukur kelayakan KPM dan kemandirian KPM untuk melakukan proses resertifikasi graduasi sesuai dengan sosial-ekonominya karena arah kebijakan PKH tidak berorientasi tentang bantuan tepat sasaran dan membantu kelancaran penyaluran bantuan sosial, tetapi bagaimana mengentaskan kemiskinan dengan menghasilkan KPM PKH yang graduasi bukan hanya karena tidak memenuhi syarat kepesertaan, namun KPM PKH juga harus berdaya (Teknis Graduasi KPM PKH, 2020).

Kecamatan Wuluhan terdapat tujuh desa dengan jumlah KPM yang beragam diantaranya Glundengan terdapat 300 KPM, Lojejer terdapat 257 KPM, Kesilir Terdapat 80 KPM, Taman Sari 230 KPM, Ampel terdapat 240 KPM, Tanjungrejo 267 KPM, Dukuh Dempok 270 KPM (Data rekap pendampingan bulan Januari 2023), berdasarkan data tersebut data KPM desa Glundengan paling tinggi diantara desa yang lain sehingga menjadi salah satu alasan memilih desa Glundengan sebagai tempat penelitian. Kondisi PKH di desa Glundengan berdasarkan hasil observasi dilapangan bahwasanya angka graduasi tidak sesuai dengan target graduasi PKH yaitu selama dampingan sebelum pergantian masa Covid-19 hanya terdapat 1 (satu) KPM saja yang melakukan graduasi mandiri sedangkan target yang ditetapkan oleh buku panduan PKH yaitu sebanyak 10% dari total jumlah KPM di wilayah tersebut.

Desa Glundengan saat ini menjadi dampingan pendamping Erik Ermawan S.Pd., menjadi wilayah dengan angka graduasi yang sangat minim. Hal ini, menjadi sebuah permasalahan yang ditinggalkan oleh pendamping sebelum digantikan oleh pendamping yang sekarang. Sehingga dapat terstimulus terkait kondisi yang menghambat tujuan (deselerasi) dari graduasi dalam program PKH di wilayah Desa Glundengan Kecamatan Wuluhan. Fakta-fakta ini menunjukkan perlunya penelitian mendalam untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan deselerasi graduasi di Desa Glundengan dan mencari solusi yang efektif untuk meningkatkan kemandirian ekonomi KPM dalam Program Keluarga Harapan.

LITERATUR

Faktor ekonomi dan sosial memainkan peran penting dalam deselerasi graduasi. Studi menunjukkan bahwa ketidakstabilan ekonomi menghambat proses keluarnya KPM dari PKH (Suryahadi & Hadiwidjaja, 2020). Selain itu, studi lain mengindikasikan bahwa rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan kerja pada anggota KPM juga menjadi penghambat utama (Rahmawati, 2019). Di sisi lain, desain kebijakan dan implementasi program yang tidak sesuai dengan kondisi lokal turut memperlambat proses graduasi (Widjaja & Nugroho, 2021; Hidayat & Prasetyo, 2020). Pendampingan yang kurang optimal, terutama di daerah terpencil, dan kurangnya sarana pendukung menjadi kendala utama dalam implementasi PKH yang efektif.

Aspek kultural dan psikologis juga mempengaruhi deselerasi graduasi. Budaya ketergantungan pada bantuan sosial di kalangan KPM sebagai salah satu faktor yang memperlambat graduasi (Setiawan, 2022). Selain itu, stigma sosial terhadap penerima bantuan sosial (Nurhidayah et al., 2021), menghambat KPM dalam mencari peluang kerja dan berintegrasi ke dalam masyarakat yang lebih luas. Pandemi COVID-19 semakin memperparah situasi ini (Kurniawan et al.,

2023), di mana banyak KPM yang hampir mandiri kembali tergantung pada bantuan karena kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Adaptasi program selama pandemi (Wahyuni, 2022), membantu mencegah kemiskinan ekstrem tetapi juga menunda proses graduasi.

METODE

Berdasarkan data rekap pendampingan 2023 kecamatan Wuluhan jumlah KPM desa Gludengan menunjukkan data 300 KPM dan juga berlandaskan dari aspek graduasi di wilayah desa Gludengan yang menunjukkan hanya 1 (Satu) KPM saja. Sehingga dalam penelitian, pemilihan tempat ditentukan menggunakan metode *purposive area*. Penelitian ini, menggunakan pendekatan *descriptive qualitative research* dengan metode *interview* secara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis menggunakan konsep Miles dan Huberman (1984) yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan sementara. Keabsahan data atau triangulasi yang digunakan yaitu dengan triangulasi sumber dan teknik atau metode sehingga dapat menghasilkan validasi data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Informan dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria informan yaitu orang untuk mengetahui, memahami dan terlibat langsung dengan kondisi program PKH sekaligus kondisi KPM di Desa Gludengan. Penelitian ini terdapat dua informan pokok dari pendamping PKH yaitu EE merupakan pendamping PKH yang saat ini baru menjadi pendamping di Desa Gludengan selama empat bulan dan NK merupakan pendamping PKH sebelum EE yang menjadi pendamping PKH di Desa Gludengan selama satu tahun. Kebutuhan informasi dilengkapi dengan informasi dari informan tambahan dari KPM PKH yang memahami kondisi PKH di Desa Gludengan yaitu AY, SM, dan HS dengan kondisi informan tambahan merupakan ketua kelompok di setiap dusun di Desa Gludengan. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis menggunakan konsep Miles dan Huberman (1984) yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan sementara. Keabsahan data atau triangulasi yang digunakan yaitu dengan triangulasi sumber dan teknik atau metode sehingga dapat menghasilkan validasi data yang dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi KPM PKH Desa Gludengan

Di Desa Gludengan, terdapat tiga dusun yaitu Krajan, Tanjungsari, dan Semberejo. Mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani, baik sebagai penggarap maupun pemilik lahan, dengan mayoritas ekonominya berada di bawah rata-rata dan menghadapi kondisi kemiskinan, terutama karena pekerjaan sebagai buruh tani. Desa ini menerima Program Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2009.

Berdasarkan data dari operator PKH Wuluhan, pada awal tahun 2023 terdapat 389 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di Desa Gludengan dengan beragam komponen dalam program tersebut. Namun, pada akhir tahun 2023, hanya tersisa 300 KPM, yang menunjukkan bahwa 89 KPM telah melakukan graduasi. Graduasi terjadi secara alamiah karena komponen yang mendukung mereka sudah habis, seperti yang dijelaskan oleh Lilis Suryati (2023) dalam petunjuk teknis Graduasi Keluarga Penerima PKH (2020). Ada tiga jenis graduasi, yaitu alamiah, mandiri, dan sejahtera mandiri. Graduasi alamiah terjadi ketika KPM tidak lagi memenuhi kriteria kepesertaan karena komponen program telah habis.

Mayoritas KPM di Desa Gludengan terdiri dari komponen lansia, mencapai 40%, yang dianggap tidak produktif secara ekonomi. Informasi ini disampaikan oleh informan EE, yang menyatakan bahwa:

"...dan sulit untuk meningkatkan kesejahteraan mereka karena bantuan yang mereka terima hanya cukup untuk kebutuhan makanan. Sisanya, 60%, terdiri dari komponen lain seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak sekolah" (informan Utama September, 2023).

Desa Gludengan telah mengalami pergantian pendampingan sebanyak lima kali, dan saat ini didampingi oleh pendamping Erik Ermawan S.Pd. Pendamping ini perlu menerapkan teknik pelaksanaan pemahaman graduasi seperti yang disarankan dalam petunjuk teknis Graduasi Keluarga Penerima PKH (2020). Edukasi kelompok dan kunjungan langsung ke rumah merupakan dua metode yang direkomendasikan untuk meningkatkan pemahaman terkait proses graduasi sehingga dapat berjalan lancar.

B. Deselerasi Graduasi PKH di Desa Gludengan

Deselerasi, merujuk pada proses penurunan kecepatan program atau aktivitas, namun dalam konteks yang diadaptasi, mengacu pada penghambatan pelaksanaan rencana atau program yang perlu diatasi untuk mencapai keberlanjutan di masa depan. Dalam konteks penelitian ini, deselerasi didefinisikan sebagai hambatan yang menghalangi proses graduasi dalam program PKH. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab deselerasi graduasi di Desa Gludengan, adapun yang menjadi penyebabnya adalah:

1. Sumber Daya Manusia (SDM) Keluarga Penerima PKH

Keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) memegang peran sentral dalam implementasi program ini. Keberagaman kondisi anggota keluarga penerima manfaat di Desa Gludengan menciptakan beragam tantangan dalam proses graduasi PKH. Salah satu masalah yang timbul adalah keengganan sebagian anggota keluarga penerima manfaat untuk mempelajari modul yang disediakan oleh pendamping PKH, yang berdampak pada kemampuan mereka dalam mengelola bantuan yang diterima.

Hal ini, juga mempengaruhi kemampuan keluarga penerima manfaat dalam menentukan prioritas kebutuhan hidup mereka. Kemampuan keluarga penerima manfaat ini sangat krusial untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Dengan rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di dalam program ini, terdapat dampak negatif terhadap pengelolaan uang atau bantuan yang diberikan oleh PKH, seperti yang diungkapkan oleh Informan EE yaitu:

“Jadi problematiknya, kemampuan KPM itu dalam mengelola keuangan tidak lurus mas, tidak mulus lebih baik-lebih baik, pada masyarakat desa glundengan itu dinamis, dia menggantungkan hidupnya rata-rata itu dari buruh beda dengan masyarakat tanjung rejo, itu menggantungkan hidupnya dari petani” (Informan utama 1, September 2023).

Dapat dimaknai bahwa masalah yang dihadapi dalam kemampuan keluarga penerima manfaat (PKH) dalam mengelola bantuan yang mereka terima sangat kompleks dan bervariasi, sehingga terkadang membuat mereka bingung dalam mengelola bantuan tersebut. Di Desa Glundengan, kemampuan keluarga penerima manfaat PKH sangat bergantung pada pekerjaan sebagai buruh tani yang pendapatannya sangat terbatas, berbeda dengan masyarakat di Desa Tanjung Rejo yang mayoritas berprofesi sebagai petani.

Kondisi lain yang berhubungan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) keluarga penerima manfaat PKH di Desa Glundengan dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan mereka. Hal ini mempengaruhi kemampuan mereka dalam menerima bantuan dengan baik, serta pola pikir dan daya tangkap mereka terhadap bantuan yang diterima. Ketergantungan pada program tersebut juga mempengaruhi kemampuan mereka dalam menerima arahan atau pembelajaran dari pendamping PKH. Berbeda dengan Desa Tanjung Rejo, di mana tingkat pendidikan penduduknya lebih tinggi, kondisi ini menunjukkan perbedaan budaya dan pendidikan antar wilayah. Seperti yang disampaikan oleh Informan NK yaitu:

“rata-rata itu kondisi masyarakat itu njagakno bantuan, seharusnya kan gini, stigma masyarakat yang seharusnya dirubah, karena stigma masyarakat yang tidak mudah dirubah. memang tidak semuanya namun bisa dikatakan mayoritas, seperti “alah wes intok bantuan PKH, akhirnya jadi ngentengno PKH, meskipun sama pendamping setiap pertemuan selalu dimarahi “ buk kalau dapat bantuan tu seperti ini, diarahkan, tapi realisasinya tidak semudah itu” (informan utama NK, September 2023)

Masyarakat yang bergantung pada bantuan menghadapi tantangan yang sulit untuk mengubah stereotip ini, yang telah menjadi umum di kalangan mereka. Peran pendamping dalam upaya pembinaan telah dilakukan melalui teguran dan metode lainnya, namun pelaksanaannya masih menghadapi banyak kesulitan. Proses dinamika untuk mengubah pola pikir keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), yang cenderung bergantung pada bantuan, merupakan tantangan yang dialami oleh pendamping PKH. Mereka mengalami kesulitan dalam menemukan keseimbangan antara menjadi tegas tanpa menyebabkan konflik, atau terlalu lembek sehingga instruksi mereka diabaikan oleh keluarga penerima manfaat. Dalam menentukan tingkat kesejahteraan keluarga, patokan yang digunakan masih sering kali bersifat subjektif dan bias, apakah berdasarkan penghasilan, aset, atau gaya hidup yang dipraktikkan oleh keluarga penerima manfaat PKH.

Dalam konteks keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Glundengan, mayoritas anggota keluarga adalah lansia, yang secara signifikan mempengaruhi pelaksanaan program graduasi. Lansia merupakan kelompok usia yang tidak lagi dalam usia produktif, sehingga mereka cenderung mengandalkan program bantuan yang tersedia. Faktor-faktor seperti rendahnya tingkat pendidikan, kesulitan dalam mempelajari modul yang diberikan, dan keberadaan lansia, semuanya berdampak pada cara keluarga mengelola bantuan yang mereka terima serta menentukan prioritas penggunaannya. Contohnya, bantuan sering digunakan untuk membayar hutang atau membeli barang mewah seperti sepeda motor.

Keberagaman suku budaya juga mempengaruhi pelaksanaan program graduasi di Desa Glundengan, yang terdiri dari tiga suku utama: Jawa, Madura, dan Osing. Keberagaman ini memengaruhi implementasi program karena setiap suku berusaha mempertahankan budaya mereka sendiri, yang dapat mencakup praktik seperti pernikahan dini. Praktik pernikahan dini ini secara langsung mempengaruhi tingkat pendidikan dan pemahaman terhadap materi yang diberikan oleh pendamping PKH. Informan NK menegaskan hal ini dalam pengamatan mereka dengan mengatakan bahwa:

“pendamping mengalami banyak kendala salah satu adalah adat istiadat, biasanya kalau orang Madura itu banyak kasus pernikahan dini, jadi kalau terjadi pernikahan dini mereka belum siap dari segmental dan finansial, jadi akan menjadi beban bagi orangtuanya, jadi tidak tambah kaya tambah menjadi lebih miskin karena nambah beban, karena faktor belum matangnya pemikiran maka banyak kasus perceraian muda akhirnya membuat beban lagi bagi anaknya atau orang tua” (Informan utama NK, September 2023).

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa pendamping PKH menghadapi tantangan dalam menjalankan proses graduasi akibat adat istiadat tertentu, seperti kasus pernikahan dini yang masih sering terjadi di kalangan masyarakat Madura. Hal ini mengakibatkan bahwa banyak dari mereka yang belum siap secara mental dan finansial, sehingga menjadi beban tersendiri bagi orang tua.

Hasil observasi yang dilakukan peneliti pada bulan September 2023 menunjukkan bahwa dalam pertemuan kelompok atau P2K2, sebagian keluarga penerima manfaat (KPM) kurang memahami bahasa yang digunakan oleh pendamping PKH. Masalah ini disebabkan karena KPM PKH di daerah Tanjungsari umumnya berkomunikasi dalam bahasa Madura, sedangkan pendamping PKH menggunakan bahasa Indonesia dengan pengaruh campuran bahasa Jawa. Hal ini menyebabkan ketidakinteraktifan dalam komunikasi antara KPM dan pendamping, yang dapat mempengaruhi efektivitas dari program yang diselenggarakan.

Menguk Hambatan Graduasi: Dinamika Program Keluarga Harapan (Pkh) Pada Keluarga Penerima Manfaat (Kpm)

Di wilayah Sumberejo dan Desa Glundengan, terdapat kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengalami defisit, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kebudayaan nikah muda dan prioritas pernikahan di atas pendidikan. Hal ini berdampak pada kualitas individu, khususnya anggota keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH). Tantangan tambahan bagi pendamping PKH adalah keberagaman suku di satu desa, di mana mereka perlu menyesuaikan diri dan mengubah budaya yang ada. Sebagai contoh, di dusun Tanjung Sari, komunitas suku Madura cenderung mempertahankan kebudayaan mereka sendiri, sementara suku Osing memiliki kecenderungan untuk menikah di usia SMP. Keberagaman suku ini juga mempengaruhi pola komunikasi dalam acara P2K2, di mana beberapa KPM mengalami kesulitan memahami bahasa yang digunakan oleh pendamping PKH, yang pada gilirannya menghambat proses pembelajaran yang diberikan.

Kondisi SDM KPM PKH berkaitan dengan teori kemiskinan yang dikemukakan oleh Kartasasmita (1996) menyatakan terdapat empat penyebab utamanya yaitu:

- a) Rendahnya kualitas pendidikan, tingkat pendidikan berpengaruh pada kemampuan seseorang dalam pengembangan diri, seperti dalam aspek pekerjaan.
- b) taraf kesehatan yang rendah, terkait status Kesehatan dan gizi rendah menyebabkan rendahnya ketahanan fisik dan fikiran.
- c) Sempitnya lapangan pekerjaan, kondisi ini berkaitan dengan kondisi pendidikan dan kesehatan, dengan kemampuan yang terbatas maka mempengaruhi kesempatan dalam mendapatkan pekerjaan
- d) Berada pada remote area, penduduk miskin secara ekonomi dan tidak berdaya karena mengalami kondisi terisolasi dan terpencil.

Kemudian kondisi SDM PKH yang telah dijelaskan berkaitan juga dengan teori kemiskinan yang dikemukakan oleh Kusnaedi (1995) yang menjelaskan faktor-faktor penyebab kemiskinan ditinjau dari keadaan sosial budaya antara lain:

- a) Budaya, keterikatan terhadap pola-pola tradisional dari ikatan adat yang kuat seringkali menghambat dalam pembaharuan ke arah yang lebih maju
- b) Pengeluaran dan keterampilan masyarakat, Faktor. ini terkait dengan faktor di atas. Akibat keterisolasian dan keterkaitan pada pola tradisional menyebabkan rendahnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat tersebut sehingga ketinggalan.
- c) Situasi politik dan kebijaksanaan penguasa.

Kebijaksanaan ini menyangkut pengalokasian anggaran yang tidak seimbang antara satu kawasan dengan kawasan lainnya dan strategi pembangunan yang timpang antara pertumbuhan ekonomi dengan pemerataannya.

Menurut klasifikasi yang diusulkan oleh Kartasasmita dan Kusnaedi mengenai faktor-faktor penyebab kemiskinan, dapat dilihat bahwa rendahnya tingkat pendidikan keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) berdampak langsung pada kemampuan mereka dalam mengembangkan potensi diri dan memanfaatkan peluang untuk meningkatkan pendapatan atau mendapatkan pekerjaan. Di Desa Glundengan, misalnya, tingkat pendidikan KPM PKH cenderung rendah, yang secara signifikan mempengaruhi kondisi ekonomi mereka. Terbatasnya kesempatan kerja juga terlihat di desa ini, dengan mayoritas penduduknya bekerja sebagai buruh tani yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kondisi ini berdampak pada pola pikir KPM PKH terhadap penerimaan bantuan, dimana terjadi kecenderungan untuk menjadi tergantung pada program PKH dan kurang termotivasi untuk mencari pekerjaan atau meningkatkan keterampilan mereka. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat Sumber Daya Manusia (SDM) KPM PKH menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan program graduasi.

Faktor keberagaman suku atau budaya pada masyarakat Glundengan berdasarkan teori kemiskinan terkait jenis kemiskinan yang diungkapkan oleh Kusnaedi terutama adat-istiadat, dijelaskan bahwasanya adat istiadat merupakan keterikatan terhadap pola-pola tradisional dari ikatan adat yang kuat seringkali menghambat dalam pembaharuan ke arah yang lebih maju. Terdapat tiga suku utama di desa Glundengan yaitu Jawa, Madura, dan Osing dengan setiap suku berusaha mempertahankan budaya masing-masing seperti budaya pernikahan dini yang mengakibatkan rendahnya tingkat pendidikan dan berpengaruh pada kualitas SDM. Keberagaman suku dan budaya berpengaruh pada tingkat pelaksanaan graduasi, sehingga dapat dikatakan menghambat pelaksanaan graduasi terutama secara mandiri sejahtera.

2. Jumlah Nominal Bantuan

Besaran nominal bantuan memiliki dampak signifikan terhadap tingkat kesejahteraan keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH). Jumlah bantuan yang diterima oleh KPM PKH sering kali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka, hanya cukup untuk kebutuhan makan sehari-hari. Akibatnya, bantuan tersebut hanya dianggap sebagai tambahan penghasilan belaka, tidak mampu diinvestasikan untuk memulai usaha yang dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Meskipun demikian, dalam realitas lapangan, beberapa masyarakat berhasil membangun usaha dari bantuan yang mereka terima, sebagaimana yang diungkapkan oleh Informan EE.

“ada KPM dari 209 dengan kondisi yang memprihatinkan, karena apa, bantuan yang diterima hanya cukup untuk kebutuhan makan”. (informan utama EE, Sptember 2023).

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada bulan September 2023 pada pertemuan kelompok atau P2K2 ditemukan bahwasanya dalam realita dilapangan masyarakat sudah membangun usaha dari bantuan yang diberikan,

namun gagal dilatarbelakangi oleh modal yang ada karena bantuan yang diberikan hanya dapat memenuhi kebutuhan pokok saja.

Kondisi dilapangan terdapat KPM PKH yang menggantungkan hidupnya pada bantuan PKH sehingga menambah kondisi yang lebih parah karena semakin tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan masyarakat yang dinamis mengakibatkan banyaknya kebutuhan masyarakat yang diluar dugaan. Pemberian bantuan PKH diberikan dalam jangka tiga bulan sekali, dengan nominal uang yang disesuaikan dengan komponen yang ada dari KPM PKH tersebut. Seperti contoh komponen anak SD yang mendapatkan bantuan sebanyak 225.000 pertiga bulan, bisa dikatakan sangat sedikit karena bantuan yang diberikan sifatnya subsidi sehingga tidak dapat memenuhi segala kebutuhan.

Kondisi ini berkaitan dengan teori yang dikemukakan oleh Scott (1976) yang dijabarkan secara lebih terperinci oleh Dixon dalam Mardikanto dan Soebianto (2019) terkait karakteristik penerima bantuan sebagai berikut:

- a) Cukup dalam keterbatasan, artinya lebih suka dengan apa adanya.
- b) Kekurangan, dalam arti kepentingan keluarga lebih utama daripada kepentingan pribadi.
- c) Tidak inovatif artinya tidak mudah menerima perubahan
- d) Fatalistik, artinya sudah jenuh dan tidak memiliki keinginan untuk berbuat sesuatu untuk perbaikan nasibnya.
- e) Tidak mampu mengantisipasi masa depan, sebagai akibat dari fatalistik yang tinggi.

Dapat dianalisis bahwasanya jumlah nominal bantuan yang diterima berpengaruh pada karakteristik KPM PKH yaitu KPM PKH mengalami cukup dalam keterbatasan yang ada, hal ini terjadi karena sudah terbiasa dengan kondisi kekurangan dan berpengaruh pada inovasi dalam meningkatkan taraf hidup. Sehingga jumlah bantuan yang diberikan berpengaruh pada penghambat dalam pelaksanaan graduasi.

3. Mekanisme pendampingan PKH

Pendamping memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan program graduasi pada Program Keluarga Harapan (PKH). Di Desa Glundengan, terdapat pergantian pendamping sebanyak lima kali, masing-masing dengan metode dan pendekatan yang berbeda. Saat ini, pendamping di Desa Glundengan adalah Mas Erik, yang baru mendampingi wilayah ini selama empat bulan dan masih dalam tahap penyesuaian teknik atau metode pendampingan. Sebelum Mas Erik, Desa Glundengan didampingi oleh Mas Nur Khoyyin selama kurang lebih satu tahun, dan sebelumnya oleh NM. Selama masa pendampingan oleh NM, muncul masalah karena kemampuan pendamping yang kurang memadai, terutama disebabkan oleh kurangnya literasi terkait modul-modul yang disediakan oleh program PKH, yang menghambat efektivitas pendampingan.

Terdapat kasus di mana pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) kurang cekatan dan tidak aktif dalam melakukan pendampingan atau mengadakan pertemuan, yang dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan program. Selain itu, pergantian pendamping yang terlalu sering juga berdampak negatif pada pelaksanaan graduasi. Setiap pendamping memiliki metode dan cara sendiri dalam melakukan pendampingan, sehingga setiap kali terjadi pergantian, metode baru diterapkan. Hal ini dapat mengganggu kontinuitas dan efektivitas program.

Kondisi ini berkaitan dengan teori yang dikemukakan oleh Saputro dan Rangga (2015) prinsip teknik pendampingan didasarkan pada pendekatan dialogis. Kemudian pendamping harus memiliki kapasitas sebagai berikut:

- a) Memiliki kepribadian ramah dan mampu mengekspresikan setuju dan menerima
- b) Mempunyai keterampilan sosial dengan kemampuan mengajak masyarakat, dan mengarahkan mereka tanpa mencederai inisiatif mereka.
- c) Memiliki kemampuan mendidik untuk meningkatkan serta menggunakan gagasan dan keterampilan masyarakat.
- d) Memiliki kemampuan mencatat dan mendokumentasikan proses serta memfasilitasi pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat.
- e) Luwes dalam menanggapi perubahan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan teori tersebut, pendamping seharusnya memiliki karakteristik yang ideal sehingga dalam bertugas dapat meminimalisir kendala yang ada, namun hal ini keterbalikan dengan kondisi pendampingan PKH yang ada di Desa Glundengan dengan kondisi sering mengalami pergantian pendamping, kemudian teknik yang digunakan juga sering berubah menyesuaikan dengan karakteristik dari pendamping PKH yang menjabat, kemudian terdapat pendamping yang kurang kredibel dalam menjalankan tugasnya, kondisi ini bersebrangan dengan teori yang ada seperti pendamping harus memiliki keterampilan sosial, memiliki kemampuan dalam memberikan resolusi dalam setiap permasalahan yang ada dalam artian memiliki intelektualitas yang memadai, sehingga pendamping PKH berpengaruh terhadap penghambat dalam pelaksanaan graduasi terutama pada kualitas dari pendampingan PKH

DISKUSI

Deselerasi graduasi dalam konteks Program Keluarga Harapan (PKH) mengacu pada penurunan atau lambatnya laju keluarnya keluarga penerima manfaat (KPM) dari program tersebut setelah mencapai kemandirian ekonomi. Teknis Graduasi adalah generasi program keempat dari Program Keluarga Harapan (PKH) yang memiliki arti pengakhiran status Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari kepesertaan PKH (Vikka, 2022). Graduasi dapat dipahami berdasarkan petunjuk

teknis Graduasi Keluarga Penerima PKH 2020, yang menyatakan bahwa terdapat 3 jenis graduasi yakni graduasi alamiah, graduasi mandiri, dan graduasi sejahtera mandiri (Lubis, 2022; Yulizar, 2022).

Graduasi alamiah merupakan berakhirnya kepesertaan disebabkan kondisi KPM PKH yang sudah tidak memenuhi kriteria kepesertaan (Mustain and Junaedi, 2022). Graduasi mandiri merupakan berakhirnya kepesertaan KPM PKH karena mengundurkan diri atas keinginan sendiri dengan alasan pribadi KPM (Yanti & Adi, 2020). Sedangkan graduasi sejahtera mandiri adalah berakhirnya kepesertaan KPM PKH karena kondisi sosial ekonomi yang sudah meningkat dan dikategorikan mampu sehingga sudah tidak layak untuk menerima bantuan sosial PKH (Masannang et al., 2023). Dapat dipahami bahwa graduasi secara alamiah merupakan proses graduasi secara otomatis secara sistem karena faktor habisnya komponen pada KPM PKH, kemudian hal tersebut tidak memiliki keistimewaan karena tidak menunjukkan tingkat kesejahteraan suatu masyarakat.

Studi ini secara teoritis berbasis pada beberapa teori yang relevan dengan tema Program Keluarga Harapan (PKH) dan pelaksanaan graduasi. Teori Scott (1976) menjelaskan karakteristik penerima bantuan, seperti kecukupan dalam keterbatasan, kekurangan, tidak inovatif, fatalistik, dan tidak mampu mengantisipasi masa depan. Teori Saputro dan Rangga (2015) menekankan prinsip teknik pendampingan yang didasarkan pada pendekatan dialogis. Teori Dixon (2019) menjelaskan karakteristik penerima bantuan sebagai berikut: kecukupan dalam keterbatasan, kekurangan, tidak inovatif, fatalistik, dan tidak mampu mengantisipasi masa depan.

Ketergantungan pada program PKH juga mempengaruhi kemampuan mereka dalam menerima arahan atau pembelajaran dari pendamping PKH (Irmayani et al., 2019; Rahmayuni, 2022). Jumlah nominal bantuan memiliki dampak signifikan terhadap tingkat kesejahteraan keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) (Nadhifah & Mustofa, 2021). Jumlah bantuan yang diterima oleh KPM PKH sering kali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka, hanya cukup untuk kebutuhan makanan sehari-hari. Akibatnya, bantuan pokok mereka, hanya dianggap sebagai tambahan penghasilan belaka, tidak mampu diinventasikan untuk memulai usaha yang dapat meningkatkan taraf hidup mereka (Ginting, 2018).

Studi ini, berhasil membeberkan faktor deselerasi graduasi di Desa Glundengan. Dimana, yang menjadi salah satu faktor adalah kondisi KPM PKH di Desa Glundengan sangat kompleks dan mempengaruhi pelaksanaan graduasi. Bahkan mayoritas KPM PKH Desa Glundengan adalah lansia, sehingga mempengaruhi tingkat pelaksanaan graduasi. Studi ini juga menemukan adanya kondisi SDM KPM PKH pada tingkat pendidikan yang sangat rendah sehingga mempengaruhi daya tangkap dan pola pikir dalam menerima bantuan. Bahkan menimbulkan rasa ketergantungan dengan program dan mempengaruhi KPM PKH dalam menerima pengarahan atau pembelajaran dari pendamping PKH. Juga terdapat keberagaman suku budaya mempengaruhi pelaksanaan graduasi, seperti pernikahan dini yang berpengaruh pada tingkat pendidikan.

Kondisi Pendampingan PKH juga mengalami kesulitan dalam melaksanakan proses graduasi karena masalah adat istiadat. Kondisi masyarakat bergantung terhadap bantuan sulit dirubah karena sudah menjadi stereotip umum. Pendamping mengalami dilematika dalam menegur atau membina KPM PKH yang bergantung pada bantuan. Oleh karena itu, berdasarkan teori kemiskinan, rendahnya kualitas pendidikan, tingkat pendidikan berpengaruh pada kemampuan seseorang dalam pengembangan diri. Sempitnya lapangan pekerjaan, kondisi ini berkaitan dengan kondisi pendidikan dan kesehatan. Berada pada remote area, penduduk miskin secara ekonomi dan tidak berdaya karena mengalami kondisi terisolasi dan terpencil.

KESIMPULAN

Pada artikel ini, peneliti telah menyajikan beberapa faktor deselerasi graduasi PKH pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yaitu kondisi KPM PKH di Desa Glundengan sangat kompleks dan mempengaruhi pelaksanaan graduasi. Kondisi SDM KPM PKH tingkat pendidikan KPM PKH di Desa Glundengan rendah, mempengaruhi daya tangkap dan pola pikir dalam menerima bantuan. Kondisi Pendampingan PKH mengalami kesulitan dalam melaksanakan proses graduasi karena masalah adat istiadat. Rendahnya kualitas pendidikan, tingkat pendidikan berpengaruh pada kemampuan seseorang dalam pengembangan diri. Sempitnya lapangan pekerjaan, kondisi ini berkaitan dengan kondisi pendidikan dan kesehatan. Berada pada remote area, penduduk miskin secara ekonomi dan tidak berdaya karena mengalami kondisi terisolasi dan terpencil.

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti merekomendasikan beberapa hal tentang cara mencegah terjadinya deselerasi graduasi yaitu meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara pendamping sosial, KPM PKH, dan pihak terkait lainnya dalam proses graduasi PKH. Hal ini dapat membantu mengurangi kesalahan dan kegagalan dalam proses graduasi, serta meningkatkan kesadaran KPM PKH tentang pentingnya graduasi mandiri.

REFERENSI

- Adinda, D., & Sunariani, N. N. (2019). Pengembangan Potensi Desa Melalui Model Desa Wisata. *Jurnal Ilmiah Manajemen Armalid*, 1. I., Purboningsih, E. R., Widiastuti, T. R., & Ninin, R. H. (2020). Studi Eksplorasi: Analisis Faktor Pendorong Ibu dari Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Program Keluarga Harapan dalam Mencapai Graduasi Mandiri. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 19(3).
- Ahmad, R. A. (2020, December). Tantangan dalam pengentasan kemiskinan: Peran lembaga keuangan mikro Islam dan keuangan sosial. In *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat* (Vol. 1, pp. SNPPM2020LPK-49). Badan Pusat Statistik. (2023). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Data BIP Gludengan Tahun 2022.

Data KPM (Keluarga Penerima Manfaat) Desa Gludengan Oleh pendamping PKH.

Data KPM PKH Kecamatan Wuluhan oleh pendamping PKH Tahun 2023

Direktorat Jaminan Sosial Keluarga. (2021). *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2021-2024*. Kementerian Sosial.

Gultom, H., Kindangen, P., & Kawung, G. M. (2021). Analisis Pengaruh Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) DAN Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 21(1), 39-53.

Ginting, R. K. (2018). *Strategi Bertahan Hidup NelayanS Tradisional di Kampung Nelayan Seberang Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

Hikmawati. F., (2020). *Metodologi Penelitian*. PT Raja Grafindo Persada Depok.

Hidayat, R., & Prasetyo, E. (2020). Tantangan Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Daerah Terpencil. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 6(2), 101-116.

Irmayani, N. R., Susantyo, B., Mujiyadi, B., Suradi, S., Erwinsyah, R. G., Sugiyanto, S., ... & Azizah, L. N. (2019). *Kinerja Pendamping Program Keluarga Harapan Pasca Diklat Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial.

Kartasasmita, Ginanjar. (1993). *Kebijaksanaan dan Strategi Pengentasan kemiskinan*. Malang: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Kurniawan, T., Wahyudi, S., & Lestari, D. (2023). Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 14(1), 77-89.

Lubis, R. S. (2022). *Motivasi KPM PKH dalam Graduasi Mandiri Di Kelurahan Sialang Sakti Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).

Mekarisce, A. A., (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat, Vol. 12. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*. 145-151.

Masannang, U. H. D., Akbar, M., & Farid, M. (2023). Strategi Komunikasi Pendamping dalam Implementasi Graduasi Mandiri Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Minasate'ne Pangkep. *JIP- Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(9), 7159-7165.

Mustain, M. M., Purnomo, H., & Junaedi, J. (2022). Keefektifan Program Keluarga Harapan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat. *Journal of Public Power*, 6(2), 85-92.

Nadhifah, L. R., & Mustofa, N. H. (2021). Pengaruh PKH dan BPNT terhadap Kemiskinan dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 3(1), 12-24.

Nurhidayah, M., Fahmi, I., & Mulyadi, A. (2021). Stigma Sosial dan Integrasi Penerima Manfaat PKH ke dalam Pasar Kerja. *Jurnal Pengembangan Masyarakat*, 11(2), 210-229.

Purwanto, R. S., Priambodo, A., Fadlurrahman, I., Widyaningrum, N., & Kodar, M. S. (2020). Kapabilitas pertahanan Indonesia menghadapi tantangan kesejahteraan masyarakat (kemiskinan, pendidikan, dan pengangguran). *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(1), 164-175.

Purwaningsih, A., & Santoso, B. (2019). *Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Peningkatan Kesehatan Keluarga Penerima Manfaat di Indonesia*. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kesehatan*, 8(2), 87-96.

Rahmansyah, W., Qadri, R. A., Sakti, R. R. A., & Ikhsan, S. (2020). Pemetaan permasalahan penyaluran bantuan sosial untuk penanganan Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 2(1), 90-102.

Rahmayuni, S. (2022). *Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kota Sabang* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).

Rahmawati, I. (2019). Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Pasar Kerja di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 4(2), 78-92.

Salim., & Syahrums., (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Citapustaka Media.

Suryahadi, A., & Al Izzati, R. (2020). *Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Kemiskinan di Indonesia*. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 24(2), 119-135.

Setiawan, B. (2022). Budaya Ketergantungan pada Bantuan Sosial di Indonesia: Studi Kasus Program Keluarga Harapan (PKH). *Jurnal Sosiologi dan Kebijakan Sosial*, 5(1), 45-62.

Suryahadi, A., & Hadiwidjaja, G. (2020). Dampak Ketidakstabilan Ekonomi terhadap Proses Graduasi KPM dari PKH. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 8(1), 33-45.

Setiawan, J. & Anggito, A., (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak.

Sugiyono., (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta CV

Suryanti, Lisis., (2023). Faktor-Faktor Pendorong dan Penghambat Graduasi Sejahtera Mandiri Penerima Program Keluarga Harapan Di Kabupaten Lampung Tengah, Tesis. Program Studi Magister Ilmu Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat, Pascasarjana, Universitas Lampung.

Menguak Hambatan Graduasi: Dinamika Program Keluarga Harapan (Pkh) Pada Keluarga Penerima Manfaat (Kpm)

- Vikka, A. (2022). DESELERASI GRADUASI PADA PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)(Studi Pada Desa Karya Basuki, Kecamatan Waway Karya, Lampung Timur (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).
- Widiyanti, H., Ati, N. U., Hayat. (2022). Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat, Studi Evaluasi Kebijakan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Pada Desa Tegalondo Kabupaten Malang, Vol.6., *Jurnal Pendidikan Tambusai*. 16484-16490.
- Wahyuni, R. (2022). Adaptasi Program Perlindungan Sosial selama Pandemi COVID-19: Kasus Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Sosial dan Ekonomi*, 10(3), 274-290.
- Widjaja, M., & Nugroho, Y. (2021). Evaluasi Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia: Perspektif Lokal. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(3), 145-158.
- Yulizar, F. S. P. (2022). KEBERHASILAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN (Studi di Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung).
- Yanti, D. F., & Adi, I. R. (2020). Analisis Process Terhadap Strategi Graduasi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Di Kabupaten Cianjur Dalam Kerangka Result-Based Management. *Empati Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 9(2), 147-163.